



SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

*THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS BY REGENCY
AUTHORITY IN ORDER TO THE SOCIETAL WELFARE MATTER BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004*

**R FRAGARIA VESCA JANANTA
NIM 080710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

*THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS BY REGENCY
AUTHORITY IN ORDER TO THE SOCIETAL WELFARE MATTER BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004*

**R FRAGARIA VESCA JANANTA
NIM 080710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*Ora Et Labora**
(Berusaha dan Berdoa)

* Safir Senduk, 2009, *Motivasi dalam Bekerja*, Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 71.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Papaku Bambang Insyaf Rijanto dan Mamaku Ritnowati tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004**

*THE FORMATION OF LOCAL REGULATIONS BY REGENCY
AUTHORITY IN ORDER TO THE SOCIETAL WELFARE MATTER BASED
ON LAW NUMBER 32 OF 2004*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**R FRAGARIA VESCA JANANTA
NIM 080710191036**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, November 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 15 NOVEMBER 2013**

**Oleh
Pembimbing,**

**R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001**

Pembantu Pembimbing,

**GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M
NIP. 197509302002121006**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN
BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

Oleh :

R FRAGARIA VESCA JANANTA
NIM 080710191036

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M
NIP. 197509302002121006

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 15
Bulan : November
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Anggota Penguji

R.A. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

GAUTAMA BUDI ARUNDHATI, S.H., LL.M
NIP. 197509302002121006

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : R FRAGARIA VESCA JANANTA

NIM : 080710191036

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansial disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 15 November 2013

Yang Menyatakan,

R FRAGARIA VESCA JANANTA
NIM 080710191036

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H., Pembantu Dekan III;
7. Bapak Iwan Rachmad S., S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan Skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;
9. Keluarga Besarku tercinta Papaku Ir. Bambang Insyaf Rijanto, dan Mamaku Ritnowati, beserta kakakku Roro Chrotalaria Octa Rianti, S.E, dan Adikku Roro Myristica Ayu Apriliana, yang sangat Penulis sayangi, Cintai, dan banggakan;
10. Indah Eka Priyastuti, S.E., terima kasih selama ini selalu setia menemani dalam suka dan duka, serta memberi dukungan dan menyemangati penulis dengan kasih sayangnya;
11. Muhammad Hoiru Nail, S.H., dan Darma Adi Sukmajaya, S.H. terima kasih atas bantuan kritik, saran, dan motivasinya;
12. Sahabat-sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Khususnya Datro, Ridzki (Ochin), Nalendra (Mo), D'jas, Oscar, Rastra, Nandu, David, Radit (Ganyok), Andi, Imron, Dana, Babi, Tepe, Tyo, Bayu (Pengkol), Gusti, Sanoë, Mirza, Lalu, Yudhi, Wayan, Arda Rahardi (Alm), Yance, Yogi D.H, Yogi A.P., Yuri, Yudhistira, Ryan, Willy, Ainul, Ali, Dika, Risma, Veny, Veda, Made, Iyren, Risha, Ratna, Jeny, Dila, dll, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi sahabat seperjuangan dibangku kuliah;
13. Teman-teman SAA7 Project di Jember, Ervan Wahono, Juan Carlo, Ulin Nayla, Meme, dan semuanya yang telah memberi motivasi kepada penulis;

14. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 15 November 2013

Penulis,

RINGKASAN

Pemerintah daerah kabupaten, dalam menjalankan pemerintahan daerah kabupaten, memiliki kewenangan legislatif sekaligus kewenangan eksekutif. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan legislatif sebagai salah satu lembaga pembentuk peraturan daerah kabupaten dan pemerintah daerah kabupaten memiliki kewenangan eksekutif, yang salah satunya, sebagai pelaksana peraturan daerah kabupaten.

Kewenangan legislatif pemerintahan daerah kabupaten sebagai salah satu lembaga pembentuk peraturan daerah Kabupaten wajib dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas materi muatan, memperhatikan pembatasan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah kabupaten, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih tinggi. Kewenangan eksekutif pemerintah daerah kabupaten salah satunya adalah menjalankan peraturan daerah kabupaten. Peraturan daerah kabupaten memiliki peran penting bagi pemerintah daerah kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan bagi daerah kabupaten.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah: bagaimana kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana kewajiban pemerintahan daerah kabupaten yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini: tipe penelitian menggunakan yuridis normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta hukum, mengumpulkan bahan-bahan hukum,

melakukan telaah atas isu hukum, menarik kesimpulan dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam membentuk peraturan daerah kabupaten meliputi kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam tahapan-tahapan pembentukan peraturan daerah kabupaten meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta kewajiban-kewajiban pemerintahan daerah kabupaten yang dipersyaratkan dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat antara lain kewajiban untuk memperhatikan kejelasan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, kewajiban untuk memenuhi asas-asas materi muatan peraturan daerah, kewajiban untuk memperhatikan ruang lingkup materi muatan, dan kewajiban untuk memperhatikan partisipasi masyarakat.

Saran dalam skripsi ini adalah pemerintah daerah kabupaten sebaiknya memperhatikan ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten serta pemerintahan daerah kabupaten, dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten, sebaiknya memperhatikan kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pemerintah Daerah	
2.1.1. Pengertian Pemerintah Daerah	11
2.1.2. Perangkat Daerah Kabupaten	11
2.1.3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	13
2.2. Pemerintah Daerah Kabupaten	
2.2.1. Pengertian Pemerintah Daerah	16
2.2.2. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	17
2.2.3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten	19
2.3. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten	
2.3.1. Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten	21
2.3.2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten	22

2.3.3. Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten.....	26
2.3.4. Materi Muatan Peraturan Daerah Kabupaten	29
2.4. International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR)	
2.4.1. Sejarah International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR).....	33
2.4.2. Pokok-Pokok Internasional Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (ICESCR).....	35
BAB 3. PEMBAHASAN	
3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	39
3.2. Kewajiban Pemerintahan Daerah Berkaitan dengan Kesejahteraan Masyarakat.....	46
BAB 4. PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	